

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi saat ini sangat cepat berkembang semakin besar, berkat kecanggihan teknologi yang ada sekarang memungkinkan kita dapat mempermudah pekerjaan yang kita lakukan. Kita dapat memanfaatkan teknologi yang ada untuk menyimpan, mengorganisir, dan mengambil data yang kita miliki. Perkembangan teknologi saat ini dapat dilihat dari kegiatan manual yang dilakukan oleh manusia sekarang sudah dalam bentuk digital dengan tujuan untuk menghemat waktu [1]. Teknologi juga memiliki dampak dan peranan yang kuat dalam kehidupan masyarakat luas yang dapat digunakan sebagai media informasi yang dikembangkan dalam bentuk [2]. Saat ini menjadi hal yang utama dan sangat penting untuk melakukan penerapan teknologi informasi pada semua bidang kerja, salah satunya dalam bidang pemerintahan desa. Penerapan teknologi berbasis website pada bidang pemerintahan desa dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pekerjaan seperti pendataan yang dilakukan oleh petugas [3](Ilmi dkk, 2024).

Kantor wali nagari Padang XI Punggasan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta melaksanakan pelayanan publik seperti melayani administrasi masyarakat, yang dalam proses pelaksanaannya berlaku bagi semua warga yang terdata sebagai penduduk di nagari Padang XI Punggasan. Salah satu tugas yang dilaksanakan oleh kantor wali nagari Padang XI Punggasan adalah menentukan keluarga yang berhak dan tidak berhak dalam mendapatkan dana bantuan masyarakat kurang mampu.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dalam penentuan masyarakat yang berhak atau tidak berhak untuk mendapatkan dana bantuan masyarakat kurang mampu pada nagari Padang XI Punggasan dengan cara penyaluran pemberian dana bantuan masyarakat kurang mampu pada nagari Padang XI Punggasan telah dilakukan lewat masing-masing kampung dan ditugaskan kepada pihak nagari yang menentukan berhak dan tidaknya keluarga untuk mendapatkan bantuan dana. Dalam proses pendataan keluarga miskin/kurang mampu saat ini dilakukan oleh masing-masing kampung secara manual pada kertas tulis, untuk selanjutnya diberikan kepada staff nagari, terdapat kendala dalam proses terkait lamanya penginformasian data masing-masing kampung dan pembuatan laporan perekapan data. Selain itu, terdapat kendala lain terkait proses penentuan pemberian dana miskin karena tidak adanya simulasi metode perhitungan.

Hal tersebut menjadi masalah pihak nagari untuk menyalurkan dana bantuan masyarakat kurang mampu sehingga masalah tersebut dapat diatasi dengan membuat sistem pendukung keputusan, berdasarkan masalah yang ada pada nagari Padang XI Punggasan maka dalam penelitian ini akan di kembangkan dengan menerapkan sistem pendukung keputusan untuk penerimaan dana bantuan masyarakat kurang mampu menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Promethee yang nantinya dapat mendukung dalam penentuan bantuan untuk masyarakat. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sebuah sistem untuk membantu pengambilan keputusan yang memiliki keluaran berupa alternatif keputusan yang pada umumnya berbentuk prioritas pilihan. Analytic Hierarchy Process (AHP) adalah salah satu metode dalam SPK, metode ini membandingkan tingkat kepentingan satu kriteria terhadap kriteria yang lain. Preference Ranking

Organization Method for Enrichment Evaluation(Promethee) adalah sebuah metode SPK yang berasal dari metode outranking dan menggunakan model MCDM yang mudah untuk digunakan dalam pengambilan keputusan (MARFUAH, 2021).

Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) merupakan system berbasis komputer yang membantu para pembuat keputusan dalam proses pengambilan keputusan. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) sebagai sistem informasi berbasis komputer yang adaptif, interaktif, dan fleksibel untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan [11]. Secara umum sistem pendukung keputusan didefinisikan sebagai bagian dari sistem informasi berbasis komputer termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan [12](Kurniawati Zai dkk, 2022). Sebelumnya, penelitian mengenai sistem penentuan bantuan langsung tunai (BLT) pernah dilakukan oleh Nur Rohmah Dyah dan Edy Nugroho. Masalah dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan masalah yang akan Penulis teliti, yaitu masalah pengentasan kemiskinan dengan cara memberikan bantuan yang tepat sasaran. Pada penelitian ini digunakan algoritma Analitical Hierarchy Process (AHP) sehingga dihasilkan rangking kelayakan calon penerima bantuan sebagai keluaran sistem (Rahardian dkk, 2018).

Adanya sistem pendukung keputusan ini, diharapkan proses pemberian dana bantuan masyarakat kurang mampu dapat dilakukan secara lebih transparan, akurat, dan efisien. Hal ini tidak hanya akan memberikan kesempatan penerimaan dana bantuan masyarakat kurang mampu bagi masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah atau masyarakat yang kurang mampu, tetapi juga akan

membantu meningkatkan kualitas pada kinerja pegawai nagari secara keseluruhan di nagari Padang XI Punggasan.

Mempertimbangkan hal tersebut dan keinginan pribadi untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh, saya tertarik untuk mengangkat judul tentang: **“SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN SELEKSI PENERIMAAN DANA BANTUAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN MENGGUNAKAN METODE AHP DAN PROMETHEE”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul tersebut, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pendukung keputusan metode AHP dan Promethee dapat membantu dalam penentuan kelayakan penerimaan dana bantuan masyarakat kurang mampu di nagari Padang XI Punggasan?
2. Apakah dengan sistem yang dirancang ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses seleksi dan pemberian dana bantuan masyarakat kurang mampu di nagari Padang XI Punggasan?
3. Apakah dengan sistem yang dibangun ini dapat membantu pihak nagari dalam proses seleksi dan pemberian dana bantuan masyarakat kurang mampu di nagari Padang XI Punggasan?
4. Bagaimana mengimplementasikan metode AHP dan Promethee dalam sistem pendukung keputusan yang dibangun dapat menghasilkan hasil yang efisien dalam penentuan kelayakan penerimaan dana bantuan masyarakat kurang mampu di nagari Padang XI Punggasan?

1.3 Hipotesa

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis kemukakan pada rumusan masalah diatas, dapat diambil suatu dugaan sementara yaitu:

1. Diharapkan sistem pendukung keputusan metode AHP dan Promethee dapat membantu dalam penentuan kelayakan penerimaan dana bantuan masyarakat kurang mampu di nagari Padang XI Punggasan.
2. Apakah dengan sistem yang dirancang ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses seleksi dan pemberian dana bantuan masyarakat kurang mampu di nagari Padang XI Punggasan.
3. Diharapkan dengan sistem yang dibangun ini dapat membantu pihak nagari dalam proses seleksi dan pemberian dana bantuan masyarakat kurang mampu di nagari Padang XI Punggasan.
4. Diharapkan penerapan metode AHP dan Promethee dalam sistem pendukung keputusan yang dibangun dapat menghasilkan hasil yang efisien dalam penentuan kelayakan penerimaan dana bantuan masyarakat kurang mampu di nagari Padang XI Punggasan.

1.4 Batasan Masalah

Agar tidak terdapat penyimpangan dalam laporan penelitian ini, maka dibuatlah batasan-batasan masalah terhadap penelitian ini. Adapun batasan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini terfokus pada penentuan kelayakan penerimaan dana bantuan masyarakatkurang mampu di nagari Padang XI Punggasan.

2. Lingkup penelitian hanya untuk penentuan kelayakan penerimaan dana bantuan masyarakat kurang mampu di kantor wali nagari Padang XI Punggasan tidak mencakup nagari lainnya.
3. Implementasi sistem penunjang keputusan metode AHP dan Promethee dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Hal ini tidak akan mencakup penggunaan bahasa pemrograman atau teknologi database lainnya.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang ada, maka penulis dapat mengemukakan tujuan penelitian ini agar penelitian terlaksanakan sesuai dengan yang diinginkan, yaitu:

1. Memudahkan pihak pemberi bantuan dalam seleksi penerimaan dana bantuan masyarakat kurang mampu di nagari Padang XI Punggasan.
2. Mempermudah pengambilan keputusan sehingga pihak pemberi bantuan dan pegawai mudah dalam menentukan langkah selanjutnya.
3. Mengimplementasikan sistem pendukung keputusan pada lingkungan nagari Padang XI Punggasan, dengan tujuan meningkatkan efiseinsi dalam penerimaan dana bantuan masyarakat kurang mampu yang dimana bantuan ini benar-benar tertuju pada masyarakat yang kurang mampu.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat perancangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terutama pihak nagari Padang XI Punggasan terkait:

1. Penelitian ini diharapkan mengurangi resiko salah sasaran pada seleksi penerimaan dana bantuan masyarakat kurang mampu di nagari Padang XI Punggasan.
2. Penelitian ini akan membantu nagari dalam mengoptimalkan proses pemberian dana bantuan masyarakat kurang mampu kepada masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah. Dengan menggunakan metode AHP dan Promethee, sistem akan memberikan rekomendasi yang sesuai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
3. Menggunakan metode AHP dan Promethee, sistem akan memberikan hasil yang lebih akurat dalam menentukan penerimaan dana bantuan masyarakat kurang mampu. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pada keputusan yang diambil oleh pihak nagari.

1.7 Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambaran umum objek penelitian merupakan deskripsi singkat mengenai apa yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Ini mencakup berbagai aspek yang relevan untuk memahami konteks dan karakteristik dari subjek yang diteliti.

1.7.1 Sejarah Nagari Padang XI Punggasan

Ribuan tahun silam dari sungai pagu ada seorang yang bernama Paklaba pekerjaan mencari manisan dan lilin laba serta mamikek buruang kenagari Punggasan sekarang yang diwaktu itu belum bernama Punggasan cuma terdiri dari rimbo rayo.dari padang tempat berpikkek buruang dari Sungai Pagu dengan melalui Bukit Musang apabila Pak Laba ka Bukik Sikai dan menurun sampai dia ke Kuleka pesisir laut Punggasan. Selama Pak Laba berpikkek sambil mencari manisan dan lilin laba pada tempat yang tersebut diatas dia pun berpandangan pada tempat dia yang dilihat yaitu sangat baik dibuat Nagari dan baik tanah yang dapat dijadikan sawah untuk ribuan penduduk.

Demikianlah kata Pak Laba tegak diatas Bukit Sikai memandang arah ke barat terlihatlah dataran rendah Punggasan yang ditengah dataran itu mengalir batang air Punggasan dengan anak sungai batang Pangian, batang air Lagan dengan anak sungai batang air Pangian, batang air Lagan yang mutunya cukup untuk dijadikan sawah untuk kebutuhan dan lainnya. Sekembalinya dia ke Sungai Pagu Pak Laba menceritakan semua pendapatnya kepada Pertuan dan Tuanku Panghulu Sungai Pagu setelah mendapat persatuan dalam sidang adat Kerapatan Adat dalam Sungai Pagu berangkatlah bersama-sama Pak Laba serta rombongan penduduk Sungai Pagu untuk melakukan peninjauan yang dia pelopori oleh satu-satunya yaitu Malayu manganjua, Kampai Rajo Putih, Panai serta lareh nan batiga sipatuik jambak, sikumbang dan caniago.

Sesampainya mereka di bukit Sikai menurun ke kayu arang kayu dibakar oleh Pak Laba sewaktu mencari manisan dan lilin laba dari kayu arang turun ke Lagan mereka mencari tempat bermalam yaitu kasabatang kayu lagan yang kecil

yaitu Lagan Kecil seorang dari Lagan Kaciak itu mereka pindah ke Lagan Gadang juga berasal dari kayu Lagan yang gadang atau besar. Dari Lagan Gadang mereka menuju arah kebarat dan bermalam pula dibawah sapohon Tandikat dan pada hari berikutnya bermalam pula sapohon Ambacang, kini semua tempat itulah menjadi Kampung. Bukit sikai, kayu arang, Lagan ketek, Lagan Gadang, Tandikek dan Ambacang.

Selesai melakukan pemeriksaan dan peninjauan yang tersebut diatas rombongan itu kembali ke Sungai Pagu menjemput kaumnya untuk membuat Taratak pada tempat yang telah ditinjaunya itu dalam perjalanan ini. Untuk menyampaikan maksudnya yang tersebut, sesampainya mereka di Bukik Sikai mereka menurun arah kekiri ke Kampung Akat sekarang. Asal namanya dari mufakat yaitu tempat membuat mufakat. Nama Nagari yang bakal dijadikan itu adalah tempat Paunggasan maka dinamakan Nagari yang bekal diperbuat itu Punggasan yang asal katanya dari Paunggasan tempat berpikek buruang dari Kampung Akat mereka mengatur membuat lading, Taratak dari Lagan Ketek ke Lagan Gadang dan seluruh kampung-kampung yang ada sekarang seperti Tandikek, Ambacang, Koto Panjang dan lain-lainnya. Timbulnya atau terjadinya penghulu-penghulu dalam Nagari Punggasan selesai dia rombongan yang datangnya dari Sungai Pagu.

1.7.2 Visi dan Misi Nagari Padang XI Punggasan

1. Visi

Mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Nagari Padang XI Punggasan nan berbudaya dan agamis.

2. Misi

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Nagari Padang XI Punggasan.
- b. Mewujudkan kemandirian ekonomi nagari dengan mengoptimalkan ekonomiproduktif yang ada di nagari.
- c. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang ekonomi masyarakat.
- d. Meningkatkan Mutu Pendidikan.
- e. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat.

1.7.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dimana adanya fungsi-fungsi, bagian-bagian maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukannya tugas dan tanggung jawab yang ada didalam suatu organisasi. Struktur organisasi sebagai sebuah hierarki (jenjang atau garis yang bertingkat) berisi komponen-komponen dimana pendiri dan penyusun perusahaan kemudian menggambarkan pembagian kerja, dan bagaimana aktivitas dalam perusahaan yang berbeda mampu saling terkoordinasi. Struktur Organisasi juga merupakan gambaran struktur kerja dari suatu organisasi, penggambaran ini dimaksud untuk mempermudah dalam koordinasi di setiap bagian dari suatu kerja suatu personil dalam melakukan tugas

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- Mengangkat dan memberhentikan perangkat nagari.
- Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset nagari.
- Menetapkan Peraturan Nagari.
- Menetapkan APB Nagari.
- Membina kehidupan masyarakat nagari.
- Mengembangkan sumber pendapatan nagari.
- Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari.
- Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat nagari.
- Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- Mengoordinasikan pembangunan nagari secara partisipatif.
- Mewakili nagari di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabulllah (ABSSBK).

2. Sekretariat Nagari

- Sekretariat Nagari dipimpin oleh Sekretaris Nagari dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Wali Nagari dalam bidang Administrasi Pemerintahan.

- Sekretaris Nagari mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya serta mengkoordinasikan tugas-tugas Kepala Urusan.

3. Kepala Urusan (Kaur)

Kepala Urusan bertanggung jawab dalam bidang teknis pemerintahan nagari. Biasanya terdiri atas beberapa divisi:

a. Kaur Umum

- Mengelola administrasi umum nagari, seperti inventarisasi aset, arsip, dan dokumentasi.
- Melaksanakan tugas administratif yang mendukung kegiatan pemerintahan nagari.

b. Kaur Keuangan

- Mengelola keuangan nagari, termasuk pengelolaan anggaran, pencatatan, dan pelaporan keuangan.
- Menyusun dokumen anggaran dan laporan keuangan nagari.

c. Kaur Perencanaan

- Menyusun perencanaan pembangunan nagari.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi program pembangunan.
- Mengelola dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari).

4. Kepala Seksi (Kasi)

Kasi bertugas menjalankan fungsi teknis operasional berdasarkan bidang masing-masing, seperti pemberdayaan masyarakat atau pemerintahan.

a. Kasi Pemerintahan

- Melakukan pelayanan administrasi terkait kependudukan dan pencatatan sipil.
- Mengelola data penduduk nagari.
- Menyusun laporan terkait urusan pemerintaha dan keamanan.

b. Kasi Kesejahteraan

- Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat.
- Mengelola kegiatan sosial, kesehatan, dan pendidikan di nagari.
- Melaksanakan program-program kesejahteraan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

c. Kasi Pelayanan

- Mengkoordinasikan pelayanan publik, seperti pengurusan surat-menysurat untuk masyarakat.
- Membantu pelaksanaan program kegiatan berbasis pelayanan kepada masyarakat.